

**EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL DALAM PENYELENGGARAAN
KEKUASAAN KEHAKIMAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

YUNITAWATI T. OLII / D 101 07 316

ABSTRAK

Judul dari skripsi ini adalah " Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945". Sedangkan yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah eksistensi Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa eksistensi Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia adalah bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Bahwa Fungsi Komisi Yudisial adalah mengawasi dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim dengan ketentuan tidak memasuki wilayah teknis yudisial. Dalam melakukan pengawasan Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.

Kata Kunci : Komisi Yudisial, Kekuasaan Kehakiman, UUD NRI 1945.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi tidak lain dari pada membicarakan hal berada atau keberadaan. Dalam kaitannya dengan Komisi Yudisial, berarti keberadaan Komisi Yudisial yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, setidaknya telah menyebabkan empat perubahan penting. *Pertama*, jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka ditegaskan dalam batang tubuh UUD NRI 1945 yang sebelumnya hanya disebutkan dalam Penjelasan UUD NRI 1945. *Kedua*, Mahkamah Agung dan badan kehakiman yang lain tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku

kehakiman. *Ketiga*, adanya Komisi Yudisial, dan *keempat*, adanya Mahkamah Konstitusi.¹

Lembaga negara baru yang lahir setelah perubahan UUD NRI 1945 adalah Komisi Yudisial. Keberadaan Komisi Yudisial merupakan wujud nyata dari perlunya keseimbangan dan saling kontrol antar lembaga kekuasaan. Kehadiran Komisi Yudisial memberi harapan bagi terciptanya institusi peradilan yang bersih dari segala bentuk penyimpangan. Keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B UUD NRI 1945. Mengenai komisi ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pada Pasal 13 undang-undang tersebut diatur mengenai kewenangan Komisi Yudisial, antara lain: Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung

¹<http://www.lawskrpsi.com/index.php?content&view=article&id=257&Itemid=257>. Diunduh Tanggal 18 April 2014.

kepada DPR; dan Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Melaksanakan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial bertugas: Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; Menetapkan calon Hakim Agung; dan Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Dalam melaksanakan wewenang menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim sebagaimana diatur pada Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Kaji lebih lanjut rumusan Pasal 24B UUD NRI 1945 setelah perubahan *juncto* UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial di atas ternyata masih terdapat ketidakjelasan menyangkut eksistensi Komisi Yudisial. Misalnya, dalam hal perekrutan hakim agung, kewenangan Komisi Yudisial hanya sebatas mengusulkan calon hakim agung kepada DPR. Tidak ada jaminan yang tegas bahwa DPR harus menerima usulan tersebut. Begitu pula dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim. Pengawasan eksternal yang dilakukan Komisi Yudisial terjadi tumpang-tindih dengan pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi.

Prosedur pengawasan, tidak jelas dan tidak tegas ditentukan siapa subjek yang mengawasi, apa objek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan. Ketidakjelasan tersebut, memicu konflik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang melahirkan *judicial review* Mahkamah Konstitusi terhadap UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006, fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim dihapus.

Pasal-pasal yang mengatur fungsi pengawasan Komisi Yudisial antara lain Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya adalah sebagai berikut : Bahwa pasal-pasal dalam UU Komisi Yudisial yang mengatur fungsi pengawasan terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum. UU Komisi Yudisial terbukti tidak rinci mengatur tentang prosedur pengawasan, tidak jelas dan tidak tegas menentukan siapa subjek yang mengawasi, apa objek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan. Fungsi Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang seharusnya hanya memberikan sebagian kewenangan pengawasan etika kepada Komisi Yudisial, secara sadar atau tidak, telah ditafsirkan dan dipraktekkan sebagai pengawasan teknis yudisial dengan cara memeriksa putusan. Dibatalkannya seluruh pasal yang mengatur fungsi pengawasan dalam Undang-Undang Komisi Yudisial sangat mempengaruhi eksistensi Komisi Yudisial.

B. Rumusan Masalah

Dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yakni “Apakah eksistensi Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ?

II. PEMBAHASAN

A. Komisi Yudisial Sebagai lembaga Negara yang Bersifat Mandiri

Komisi yudisial Republik Indonesia, merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui kewenangannya yang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta melakukan pengawasan (pengawasan eksternal) terhadap hakim sebagai pelaku kekuasaan yang transparan dan partisipatif guna menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pasal 12B UUD 1945 maka, kedudukan Komisi Yudisial telah mendapatkan justifikasinya dari konstitusi dengan memberikan kewenangan sebagai pendukung lembaga peradilan.

Lembaga negara yang bersifat mandiri dalam tugasnya maupun dalam kedudukannya sebagai lembaga negara komisi yudisial memiliki kewenangan sebagaimana ditetapkan undang-undang yaitu: (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR; (2) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim². Dari wewenang pertama kita dapat mengatakan bahwa KY adalah sebuah lembaga Negara yang mempunyai wewenang melayani. Dengan demikian KY dapat dinamakan lembaga Negara yang memberi pelayanan (auxiliary body). Akan tetapi, apabila kita perhatikan wewenang yang kedua, maka KY bukanlah auxiliary body. Artinya, KY adalah lembaga Negara utama. Dengan demikian, menurut **Sri Soemantri**³ dalam diri KY terdapat dua sifat lembaga Negara. Rumusan Pasal 24B UUD 1945 pasca amandemen juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut di atas secara substansial dinilai masih melemahkan posisi KY, dan tidak sesuai dengan gagasan awal pembentukan KY. Keberadaan KY secara lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 24B UUD 1945 adalah:

Ayat (1): Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

²Pasal 24B UUD NRI 1945 pascaamandemen juncto Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

³Sri Soemantri M, "Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketata Negara Menurut UUD NRI 1945", dalam Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 203-204

Ayat (2): Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;

Ayat (3): Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR;

Ayat (4): Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan UU.

Lembaga Negara yang bersifat mandiri dalam tugasnya, Komisi Yudisial melaksanakan kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung Komisi Yudisial memiliki tugas: (1) melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; (2) melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; (3) menetapkan calon Hakim Agung; (4) mengajukan calon Hakim Agung ke DPR⁴. Sedangkan dalam melaksanakan kewenangan menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim Komisi Yudisial memiliki tugas melakukan pengawasan⁵. Terhadap pelaksanaan pengawasan ini Komisi Yudisial dapat: (1) menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim; (2) meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim; (3) melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim; (4) memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan (5) membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Dugaan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim terbukti, artinya Perilaku hakim benar-benar menyimpang dari peraturan perundang-undangan maka komisi yudisial dapat mengajukan usul penjatuan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi⁶. Usul penjatuan sanksi dapat

⁴Pasal 14 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

⁵Pasal 20 Undang-Undang Komisi Yudisial

⁶Paal 21 Undang-Undang Komisi Yudisial

berupa: teguran tertulis; pemberhentian sementara; atau pemberhentian yang bersifat mengikat. Selain sebagaimana yang telah diuraikan di atas Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan Kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim Komisi Yudisial.

Kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial tidak mempunyai kekuatan mengikat karena sifatnya hanya “mengusulkan pengangkatan calon Hakim Agung” dan tidak mempunyai akibat hukum karena jika calon yang diusulkan tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak mendapat penetapan (Beschikking) dari Presiden alias usulan ditolak, tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dalam hubungan ini kewenangan yang bersifat penuh justru ada pada Dewan Perwakilan Rakyat yaitu memberikan Persetujuan dan pada Presiden yaitu memberi penetapan kedua bentuk kewenangan ini mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai akibat hukum.

Ketentuan Pasal 24B ayat (1): kewenangan Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain (dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim). Wewenang pokok Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung (yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum). Sedangkan wewenang tambahan yang diberikan kepada Komisi Yudisial adalah wewenang lain. Ternyata di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial kata wewenang lain dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditafsirkan dan diartikan sebagai pengawasan dalam undang-undang.

B. Komisi Yudisial Sebagai Pengawas Perilaku Hakim

Komisi yudisial dalam melakukan fungsi pengawasan berlandaskan pada kekuasaan yang diberikan oleh pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang dijabarkan dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, menentukan:

- a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
- b. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- d. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim;
- e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan ke Mahkamah Agung dan/Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR”.

Komisi yudisial Tetap berusaha menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim dengan melakukan kewenangan atau kekuasaannya sebagai berikut:⁷

- a. Dari mulai berdirinya Komisi yudisial yaitu pada bulan Agustus 2005 sampai dengan 23 Juni 2006 Komisi yudisial telah menerima laporan masyarakat sebanyak 754 yang mengadakan perilaku hakim;
- b. Dari jumlah laporan yang masuk tersebut, sebanyak 333 laporan telah diteliti dan di periksa dan dari jumlah itu sebanyak 75 laporan tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak ditemukannya indikasi pelanggaran kode etik;
- c. 106 laporan diminta kelengkapan laporannya kepada pelapor;
- d. 42 laporan dapat ditindak lanjuti yaitu dengan memanggil hakim-hakim yang dilaporkan untuk dimintakan klarifikasinya;
- e. 82 laporan masih dalam proses pendalaman;
- f. 25 laporan siap untuk diputuskan oleh sidang pleno Komisi Yudisial;
- g. 3 laporan dicabut oleh pelapornya; dan
- h. 79 hakim telah dipanggil dan diminta keterangan;

⁷<http://www.academia.edu/6795207/Buku-tim-2>
. Diunduh Tanggal 20 April 2014.

- i. 18 hakim direkomendasikan kepada mahkamah Agung untuk diberikan sanksi.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan mempergunakan pendekatan kekuasaan yang merekomendasikan untuk diberikan sanksi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, tanpa mau melihat perundang-undangan lain, dan itu pun tidak dilakukan secara benar; akibatnya ialah:⁸

1. Sepak terjang Komisi Yudisial telah melampaui batas wewenangnya, sehingga meresahkan serta mengganggu kinerja hakim;
2. Komisi Yudisial menjadikan media pengawasannya memasuki substansi/wilayah teknis penyelesaian perkara, sehingga bukan saja mengintervensi dan intimidasi tapi juga cenderung merusak sistem;
3. Komisi Yudisial menjurus perbuatan tirani terhadap para hakim yang memutus bebas, seperti mengusulkan hakim untuk diberhentikan sementara, dan apabila perbuatan ini dibiarkan akan menghancurkan sistem ketatanegaraan khususnya lembaga yudikatif.

C. Perwujudan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka

Usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, Komisi Yudisial Republik Indonesia, merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui kewenangannya yang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta melakukan pengawasan (pengawasan eksternal) terhadap hakim sebagai pelaku kekuasaan yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pasal 12B UUD 1945 maka, kedudukan Komisi Yudisial telah mendapatkan justifikasinya dari konstitusi dengan memberikan kewenangan sebagai pendukung lembaga peradilan.

⁸<http://majelisduha.wordpress.com/2008/11/22/menjelang-babak-akhir-perseteruan-ma-dan-ky/>.
Diunduh Tanggal 24 April 2014.

Dengan konstruksi demikian timbul permasalahan hukum terutama berkaitan dengan eksistensi KY dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini cukup dipahami, karena KY bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman tapi mengapa keberadaannya diatur dalam bab kekuasaan kehakiman. Menanggapi hal ini Sri Soemantri⁹, mengatakan KY yang oleh MPR ditempatkan dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dianggap sebagai kecelakaan. Karena memang dalam hal tertentu mungkin ada hubungannya dengan MA, akan tetapi dia bukan badan peradilan. Sedangkan menurut pendapat **Philipus M. Hadjon**¹⁰, bahwa di adopsinya KY dalam UUD 1945 merupakan keputusan yang terburu-buru, karena hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum.

Kejelasan bangunan hukum KY dalam struktur ketatanegaraan terutama dalam kekuasaan kehakiman, dapat dikaji dari ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Secara operasional ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut dijabarkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (yang selanjutnya disebut UUKY), bahwa dalam kedudukannya sebagai lembaga negara komisi yudisial diberi kewenangan antara lain:

⁹Sri Soemantri M, *Opcit*, hlm. 203

¹⁰Pernyataan lisan Philipus M. Hadjon, pada dialog interaktif dalam Seminar Good Governance dan Good Governance di FH Unair Surabaya pada Kamis 28 Februari 2008.
https://www.google.co.id/search?hl=id&noj=1&q=menurut+pendapat+philipus+M%2C+hadjon+bahwa+diadopsinya+ky+dalam+uud+1945+merupakan+keputusan+yang+terburu-buru&gs_l=serp.3...387508.453856.0.454363.111.108.1.0.0.2.5286.83789.17j11j11j5j7j8j14j9j7j10.99.0...0...1c.1.45.serp..95.16.7041.aDYXMQ6JLKM.
Diunduh Tanggal 24 April 2014.

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR;
- b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Rumusan Pasal 24B UUD 1945 pascaamandemen juncto Pasal 31 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut diatas secara substansial dinilai masih melemahkan posisi KY, dan tidak sesuai dengan gagasan awal pembentukan KY. Maka khusus untuk cabang kekuasaan yudikatif prinsip yang tetap dipegang ialah bahwa dalam tiap Negara hukum badan yudikatif haruslah bebas dari campur tangan eksekutif¹¹. Ini dimaksudkan agar badan yudikatif dapat berfungsi secara sewajarnya demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak asasi manusia. Sebab hanya dengan asas kebebasan badan yudikatif itulah dapat diharapkan bahwa keputusan yang diambil, dalam suatu perkara tidak akan memihak dan berat sebelah dan semata-mata berpedoman pada norma-norma hukum dan keadilan serta hati nurani hakim itu sendiri dengan tidak takut terancam kedudukannya

Pada dasarnya, baik dalam perlindungan konstitusional maupun dalam hukum administrasi, perlindungan yang utama terhadap individu tergantung pada badan kehakiman yang tegas, bebas dan berani serta dihormati. Pasal 10 Universal Declaration of Human Right memandang kebebasan dan tidak memihaknya badan-badan pengadilan di dalam tiap-tiap Negara sebagai suatu hal esensi. Badan yudikatif yang bebas adalah syarat mutlak didalam suatu masyarakat yang bebas dibawah Rule of Law. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan dari intervensi badan eksekutif, legislatif ataupun masyarakat umum, didalam menjalankan tugas yudikatifnya. Akan tetapi kemudian, tidaklah berarti bahwa hakim itu boleh bertindak secara serampangan saja. Bahwa prinsip independensi

kekuasaan kehakiman haruslah diimbangi dengan prinsip akuntabilitas¹².

Ekses-ekses yang mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 2004:¹³

- a. Perilaku yang tidak tunduk pada undang-undang

Menurut Pasal 24 ayat (1) huruf c bahwa Komisi Yudisial dalam rangka melaksanakan pengawasan, dapat memanggil dan meminta keterangan hakim yang diduga melanggar Kode Etik Perilaku Hakim.

Pemanggilan terhadap beberapa Hakim Agung yang diduga terkait dalam kasus suap dalam dua kali surat Panggilan Komisi Yudisial tidak diindahkan oleh Hakim Agung (Ketua Mahkamah Agung) padahal sebagai petinggi hukum, keteladanan sangat dibutuhkan dalam rangka melaksanakan prinsip *Equality Before The Law* serta memberi suri teladan pada hakim lainnya.

- b. Rekomendasi Komisi Yudisial tidak dilaksanakan.

Pemeriksaan terhadap beberapa hakim yang diduga melanggar kode etik dan oleh Komisi Yudisial telah direkomendasikan beberapa hakim kepada Mahkamah Agung untuk dilaksanakan atau paling tidak untuk dipertimbangkan.

Menanggapi hal itu Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menyatakan di Jakarta yang oleh beberapa korang, “bukan rekomendasi Komisi Yudisial itu terserah kami, apa kami mau masukkan ke kotak sampah terserah kami.”

Dapat dibayangkan betapa ucapan Hakim Agung yang melecehkan undang-undang, padahal ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2004 tersebut menyatakan bahwa usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 23 ayat (1) beserta alasannya bersifat mengikat disampaikan

¹²*Ibid.*

¹³<http://dimasprasidi.wordpress.com/2011/01/17/lima-tahun-komisi-yudisial-rekomendasi-untuk-revisi-uu-no-22-tahun-2004-tentang-komisi-yudisial/>.
Diunduh Tanggal 24 April 2014.

¹¹Iyan Fitriana, *Pola Relasi KY Dengan Lembaga Negara Lain*, Buletin Komisi Yudisial Vol. II No. 2- Oktober 2007, hlm. 28-31

oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung.

- c. Konspirasi Hakim Agung dan Advokat untuk bubarkan Komisi Yudisial di Hotel Danau Sunter Jakarta Utara tanggal 2 Pebruari 2006 dengan jalan atau rencana melaporkan anggota Komisi Yudisial ke Polisi kemudian smereka akan mengatur penyidik POLRI memeriksa anggota Komisi Yudisial tersebut. Terlepas benar atau salah isi dokumen tersebut, telah dilihat bahwa pertemuan tersebut memberikan salah satu bukti bahwa mafia peradilan di lingkungan peradilan tertinggi tersebut memang ada.

Fungsi tambahan Komisi Yudisial yaitu “mengawasi Hakim Agung dan hakim-hakim” jelaslah bahwa fungsi tambahan ini melebihi fungsi pokok, apalagi jika pengawasan itu dilakukan terhadap lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Sehingga akibat dari fungsi pengawasan itu bukan hanya dalam rangka checks and balances tetapi malah akan mengganggu, serta bertentangan dengan prinsip kemandirian dan kebebasan hakim. Sebab dalam teori Hukum Tata Negara dikenal adanya checks and balances yang dalam bahasa Undang-Undang Dasar disebut hubungan antar lembaga negara yang saling mengawasi dan saling mengimbangi baru bisa berjalan dengan baik jika:¹⁴

1. Adanya kesederajatan (hubungan horizontal) antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya.
2. Adanya pembagian tugas dan wewenang yang seimbang dan merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk masing-masing lembaga negara.
3. Adanya hubungan yang saling mengawasi antar lembaga negara yang mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai akibat hukum.

Dari segi kewenangan Komisi Yudisial dapat dikatakan tidak akan dapat melakukan pengawasan kepada Hakim Agung dan Hakim Konstitusi karena dari segi kewenangannya, Komisi Yudisial tidak sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, kewenangannya tidak seimbang dengan mahkamah agung dan Mahkamah Konstitusi serta pengawasannya tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum kepada Hakim, tetapi malah akan mengganggu, tetapi justru akan bertentangan dengan prinsip kemandirian dan kebebasan hakim, dalam beberapa kasus campur tangan Komisi Yudisial di dalam pengadilan adalah:¹⁵

1. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar dipanggil karena hanya menjatuhkan pidana 3 (tiga) bulan terhadap Terdakwa pemakai Narkoba.
2. Ketua Pengadilan Jakarta Selatan dipanggil ke Komisi Yudisial karena masalah eksekusi tanah/rumah. Yang akan di eksekusi adalah suatu Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Perkara No. 1015/Pdt.G/2004/PN.Jkt. Selatan.), eksekusi tertunda.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Pidana No. 2068/Pid.B/2005/PN.Jkt. Selatan perkara Trdakwa Neloe, Cs direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dengan alasan:
 - a. Majelis dalam memutus perkara tersebut menggunakan delik materiil, pada hal menurut Komisi Yudisial Undang-undang No. 31 Tahun 1999 adalah Delik Formil;
 - b. Majelis menggunakan Undang-undang No. 1 Tahun 2004, padahal kasusnya terjadi pada tahun 2002; Artinya hakim dilarang menggunakan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 dalam kasus tersebut;

¹⁴<http://lisasuroso.files.wordpress.com/2008/04/s-etengah-jimly-asshiddiqie.pdf>. Diunduh Tanggal 19 April 2014.. Diunduh Tanggal 19 April 2014.

¹⁵O.C. Kaligis & Associates, *Mahkamah Agung vs Komisi Yudisial Di Mahkamah Konstitusi: Reformasi Pengawasan Hakim*. Jakarta. 2006. hlm. 108.

- c. Mengucapkan kata-kata “come on baby...bentangkan karpet merah bagi koruptor....”
- Putusan tersebut di atas saat ini dalam permohonan kasasi
4. Dua orang Hakim Tindak Pidana Korupsi, **Kresna Menon** dan **Sutiyono** diusulkan untuk dijatuhi sanksi pemberhentian sementara, karena dianggap melanggar KUHAP. Apabila undang-undang dengan jelas mengatur hal-hal yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus perkara, maka hakim harus menjalankannya dan tidak dibenarkan hakim menafsirkan atau merujuk pada peraturan yang bertentangan dengan undang-undang tersebut.
 5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dipanggil oleh Komisi Yudisial karena mengganti 3 (tiga) orang Hakim Ad Hoc (berita media massa).
 6. Komisi Yudisial bersurat kepada Ketua Mahkamah Agung untuk meminta penjelasan tentang apa alasan dari Ketua Mahkamah Agung memindahkan tempat sidang Terdakwa DL. Sitorus.

Bahwa di dalam Pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak satu kalimat pun menyebut atau mempergunakan kata “pengawasan”. Akan tetapi kata pengawasan itu muncul dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004. Pengawasan itu adalah media, sedangkan tujuan pokoknya adalah “menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”.

Berkaitan dengan itu, kehadiran Komisi Yudisial di dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagai “asesor” demokrasi atau proses penegakan hukum. Pihak Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengawasan hakim cukup dilakukan melalui pengawasan internal yang telah dilakukan Mahkamah Agung selama ini. Pengawasan hakim melalui Komisi Yudisial justru dipandang dapat mengganggu kemandirian dan kebebasan hakim tidak bisa sepenuhnya diterima.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut: Bahwa eksistensi Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Bahwa Fungsi Komisi Yudisial adalah mengawasi dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim dengan ketentuan tidak memasuki wilayah teknis yudisial. Dalam melakukan pengawasan Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.

B. Saran

Diharapkan kepada Komisi Yudisial dalam melaksanakan kewenangannya mengusulkan hakim agung dengan hati-hati dan penuh pertimbangan agar tidak terjadi pelanggaran perilaku hakim, dan diharapkan agar Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim dengan usaha yang maksimal dan tidak memasuki wilayah teknis yudisial dan melakukan pemeriksaan secara bijaksana terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim yang telah dilaporkan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, Jakarta, 2004.
- C. Kaligis & Associates, *Mahkamah Agung vs Komisi Yudisial Di Mahkamah Konstitusi: Reformasi Pengawasan Hakim*. Jakarta. 2006.
- Iyan Fitriayana, *Pola Relasi KY Dengan Lembaga Negara yang Lain*, Buletin Komisi Yudisial Vol. II No 2- Oktober 2007.
- Mustafa Abdullah, *Fungsi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Bermartabat dan Profesional*, Buletin Komisi Yudisial Vol. II No 2- Oktober 2007.
- Sri Soemantri M, "*Lembaga Negara dan State Auxillary Bodies dalam Sistem Ketata Negara Menurut UUD 1945*", dalam *Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415)

C. Internet

- http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=257&Itemid=257. Diunduh Tanggal 18 April 2014.
- <http://www.academia.edu/6795207/Buku-tim-2>) . Diunduh Tanggal 20 April 2014.
- <http://dimasprasidi.wordpress.com/2011/01/17/lima-tahun-komisi-yudisial-suatu-rekomendasi-untuk-revisi-uu-no-22-tahun-2004-tentang-komisi-yudisial/> . Diunduh Tanggal 24 April 2014.
- <http://lisasuroso.files.wordpress.com/2008/04/setengah-abad-jimly-asshiddiqie.pdf>. Diunduh Tanggal 19 April 2014.

BIODATA

YUNITAWATI T.OLEH, Lahir di Kali, 14 Januari 1988, Alamat Rumah
BTN. Pengawu Blok J1 Nomor 34 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon
+6282347571546, Alamat Email yunitawati83@yahoo.co.id

